



Peran partisipasi *stakeholder* dalam reformasi birokrasi di lingkup pemerintah Kabupaten Pekalongan

ROBBY DARUSSALAM^{1*}

¹ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Jawa Timur, 60118, Indonesia

* Korespondensi: robbyesco2@gmail.com

Diterima:

Disetujui: 20 Desember 2023

ABSTRAK

Latar Belakang: Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mencapai perubahan yang lebih efisien, akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan keterlibatan dalam organisasi atau institusi tertentu, diharapkan reformasi birokrasi dapat lebih berhasil dan berdampak positif bagi pelayanan publik dan pembangunan negara secara keseluruhan. **Metode:** Tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu digunakan dalam penulisan artikel ini. **Temuan:** Peran dan partisipasi *stakeholder* penting dalam proses reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi telah menjadi sorotan utama dalam upaya meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas di berbagai negara. *Stakeholder* memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi secara signifikan dalam upaya reformasi birokrasi. Artikel ini juga akan menggalang beberapa tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam melibatkan *stakeholder* dalam proses reformasi birokrasi, seperti perbedaan kepentingan, kurangnya koordinasi, dan resistensi terhadap perubahan. **Kesimpulan:** Dengan pembahasan ini, diharapkan dapat diidentifikasi rekomendasi dan strategi yang relevan bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan partisipasi *stakeholder* dan mendorong proses reformasi birokrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

KATA KUNCI: partisipasi; reformasi birokrasi; *stakeholder*.

ABSTRACT

Background: The purpose of this writing is to achieve more efficient, accountable, transparent, and responsive changes to meet the needs of society. By involving various parties with interests and involvement in a particular organization or institution, it is hoped that bureaucratic reform can be more successful and have a positive impact on public services and national development as a whole. **Methods:** Literature review from previous research is used in writing this article. **Finding:** The role and participation of stakeholders are crucial in the process of bureaucratic reform. Bureaucratic reform has been a major focus in efforts to improve efficiency, accountability, and quality public services in various countries. Stakeholders have great potential to contribute significantly to bureaucratic reform efforts. This article will also explore some challenges and obstacles that may be encountered in involving stakeholders in the bureaucratic reform process, such as differences in interests, lack of coordination, and resistance to change. **Conclusion:** With this discussion, it is hoped that relevant recommendations and strategies can be identified for stakeholders to enhance stakeholder participation and promote a more inclusive and sustainable bureaucratic reform process.

KEYWORDS: participation; bureaucratic reform; *stakeholder*.

Cara Pengutipan:

Darussalam, R. (2024). Peran partisipasi *stakeholder* dalam reformasi birokrasi di lingkup pemerintah Kabupaten Pekalongan. *CRSUSF: Critical Issue of Sustainable Future*, 1(1), 49-57. <https://doi.org/10.61511/crsusf.v1i1.721>.

Copyright: © 2024 dari Penulis. Dikirim untuk kemungkinan publikasi akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan dari the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



1. Pendahuluan

Partisipasi *stakeholder* adalah aspek penting dalam manajemen proyek, organisasi, atau kegiatan tertentu. Hal ini melibatkan proses di mana individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap suatu inisiatif dilibatkan dalam berbagai tahap pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan. Partisipasi mereka penting karena mereka bisa memberikan wawasan, dukungan, dan perspektif yang berbeda. Partisipasi *stakeholder* penting karena dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Hal ini juga membantu mengurangi risiko konflik, meningkatkan dukungan untuk proyek atau inisiatif, serta memastikan dampak sosial dan lingkungan yang lebih positif.

Reformasi birokrasi adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap sistem birokrasi yang ada dalam sebuah negara atau organisasi. Reformasi birokrasi adalah sebuah langkah penting yang bertujuan untuk memperbaiki sistem administrasi publik agar lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berkualitas. Proses ini melibatkan berbagai upaya untuk menyederhanakan prosedur, meningkatkan kompetensi pegawai, memperkuat pengawasan, dan memastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar yang tinggi. Selain itu, reformasi ini juga harus diikuti dengan komitmen yang kuat dalam menerapkan perubahan dan mengatasi tantangan yang mungkin timbul selama proses reformasi.

Arah kebijakan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menekankan pada terciptanya pemerintahan yang bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, birokrasi harus efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat. Salah satu upaya utama untuk mewujudkannya adalah melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan proses penting untuk mengelola pemerintahan dengan lebih profesional, berpegang pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan pentingnya keterbukaan informasi sebagai sarana untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan birokrasi. Undang-undang ini memberikan mandat yang jelas bahwa informasi publik harus dikelola dan disediakan dengan baik sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Pemerintah dan berbagai lembaga harus membangun dan menata ulang struktur organisasi mereka untuk memenuhi tuntutan keterbukaan informasi. Hal ini mungkin melibatkan pembentukan unit khusus yang menangani permintaan informasi dan mengelola data yang harus dipublikasikan. Fungsi humas (hubungan masyarakat) dalam birokrasi harus diperkuat untuk mengkomunikasikan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat.

Humas juga harus memfasilitasi aliran aspirasi dan umpan balik dari masyarakat kepada pemerintah. Ini membutuhkan perubahan peran dari sekadar penyampaian informasi menjadi mediator yang aktif antara pemerintah dan publik. Dengan memperkuat fungsi dan peran humas, serta membangun komunikasi yang lebih efektif dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal, pemerintah dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, pengaruh, atau keterlibatan dalam suatu organisasi atau instansi.

Hubungan instansi pemerintah dengan pemangku kepentingan merupakan hasil akhir dari rangkaian kegiatan (1) pengumpulan data tentang pemangku kepentingan organisasi/instansi, (2) pengolahan dan analisis data, (3) diskusi tentang kriteria penentuan klasifikasi pemangku kepentingan, (4) penetapan strategi, serta (5) perumusan berbagai pendekatan dan agenda program yang akan dilaksanakan secara bersama-sama dengan pemangku kepentingan. Rangkaian kegiatan yang disebutkan merupakan proses

pemetaan pemangku kepentingan. Pemetaan pemangku kepentingan adalah langkah awal yang sangat penting dan harus dilakukan sebelum merumuskan kebijakan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan data dasar yang diperlukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

2. Metode

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan melalui studi kasus di pemerintah Kabupaten Pekalongan. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis situasi atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan. Dengan metode ini, peneliti berupaya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, memahami kondisi aktual, serta mengolah dan menganalisis data yang diperoleh untuk menarik kesimpulan. Penelitian kualitatif yang diterapkan dalam studi ini bersifat deskriptif dan menekankan pada proses serta makna yang ada di balik fenomena yang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang situasi yang diteliti dengan cara menggali perspektif, pengalaman, dan interpretasi dari para informan atau subjek penelitian.

Metode penelitian yang disebutkan adalah metode *purposive sampling* atau pemilihan tempat secara sengaja. Metode ini digunakan dalam penentuan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu yang relevan dengan penelitian. *Purposive sampling*, atau sampling bertujuan, adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti memilih lokasi atau subjek secara sengaja karena mereka memiliki karakteristik atau kasus yang spesifik dan relevan dengan tujuan penelitian. Metode ini adalah teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Dengan metode ini, peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut ditentukan oleh peneliti berdasarkan pengetahuan dan keahlian mereka, serta berdasarkan kebutuhan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan lebih tepat.

Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan kunci. Data yang didapat dari informan kunci berupa hasil wawancara kepada kepala desa secara langsung. Sementara itu, data sekunder merupakan jenis data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan umumnya telah melalui proses pengolahan dan penyajian. Data ini bisa berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang disimpan dalam arsip atau bentuk dokumenter lainnya. Secara sederhana, data sekunder adalah data primer yang telah diolah dan disajikan kembali oleh pengumpul data awal atau pihak lain.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Partisipasi

Partisipasi bukan hanya tentang kehadiran atau keterlibatan individu atau kelompok dalam proses tertentu, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan didistribusikan dan digunakan dalam proses tersebut. Partisipasi dalam demokrasi tidak hanya tentang menghadirkan suara warga, tetapi juga tentang bagaimana suara tersebut dapat berkontribusi secara efektif dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Melalui pendekatan yang inklusif dan deliberatif, partisipasi dapat menjadi alat yang kuat untuk mencapai tujuan bersama dan memperkuat demokrasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, partisipasi masyarakat diakui sebagai elemen penting dalam

proses penyusunan rencana pembangunan. Penjelasan Pasal 2 ayat 4 huruf d menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat diterjemahkan sebagai keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Dalam konteks Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting yang diatur dalam penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d.

Partisipasi masyarakat penting dalam berbagai aspek pembangunan. Masyarakat berkontribusi secara sukarela terhadap program-program pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Masyarakat terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan pembangunan mereka sendiri. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan diakui sebagai kunci keberhasilan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan, program-program tersebut dapat menjadi lebih relevan, efektif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pernyataan tersebut menegaskan pergeseran dalam konsep partisipasi masyarakat dari sekadar memberi sumbangan atau bantuan kepada mereka yang membutuhkan menuju kepada keterlibatan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Cohen dan Uphoff dalam Ndraha (1990:104) menguraikan bentuk-bentuk partisipasi yang terbagi dalam empat bentuk, yaitu (1) partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*), (2) partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*), (3) partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*), dan (4) partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*).

3.2 Urgensi perencanaan pembangunan partisipatif

Masyarakat adalah sumber legitimasi utama bagi pemerintah dalam sistem demokrasi. Kekuasaan pemerintah berasal dari dan bertanggung jawab kepada rakyat. Masyarakat memiliki pengetahuan lokal dan pengalaman langsung tentang kondisi dan kebutuhan di wilayah mereka. Pembangunan yang berhasil memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan adalah salah satu cara untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam distribusi sumber daya dan manfaat pembangunan. Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan bukan hanya tentang meminta masukan mereka pada tahap awal, tetapi juga tentang memastikan keterlibatan yang berkelanjutan sepanjang seluruh siklus pembangunan. Dengan memperkuat peran masyarakat dalam proses pembangunan dan penentuan keputusan publik, kita dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan bagi kemajuan bersama.

Pernyataan tersebut sangat relevan dalam konteks pembangunan suatu negara. Dalam masyarakat yang beragam, dengan kepentingan dan nilai-nilai yang berbeda-beda, penting untuk memperhitungkan sudut pandang yang beragam pula dalam proses pembangunan. Sudut pandang pemerintah, meskipun penting, tidak cukup karena mungkin saja tidak mencakup semua kepentingan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam masyarakat, termasuk warga negara, kelompok masyarakat sipil, organisasi nonpemerintah, dan sektor swasta.

Pengikutsertaan publik dalam proses penentuan kebijakan publik merupakan suatu pendekatan yang penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat secara luas. Melalui perencanaan partisipatif, berbagai pihak dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi terkait.

3.3 Stakeholder

Stakeholder dalam konteks program pembangunan memiliki peran yang beragam, dan klasifikasi mereka dapat dilakukan berdasarkan peran yang mereka mainkan dalam proses tersebut. Mereka yang memiliki kemampuan untuk memberikan dampak, baik secara positif maupun negatif, terhadap program pembangunan. Klasifikasi *stakeholder* ini membantu dalam identifikasi dan pengelolaan hubungan serta dinamika antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu program pembangunan. Dengan memahami peran dan kepentingan mereka, pengambil keputusan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan program sambil meminimalkan konflik dan memaksimalkan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat, yaitu sebagai berikut.

a. *Policy creator*

Policy creator adalah *stakeholder* yang berperan sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan. *Stakeholder* yang berperan sebagai *policy creator* dalam partisipasi dalam reformasi birokrasi di lingkup pemerintah Kabupaten Pekalongan. Bupati Kabupaten Pekalongan selaku kepala daerah sekaligus sebagai pimpinan tertinggi di pemerintahan daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai pengaruh dan peran yang sangat besar dalam menentukan arah kebijakan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan.

Kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Pekalongan pada kelanjutannya dijadikan sebagai arahan dan pedoman bagi tim koordinasi dan kelompok kerja. Di antara kebijakan fundamental yang diambil oleh Bupati Kabupaten Pekalongan dalam mendukung pengembangan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Pekalongan adalah kebijakan dalam mengarahkan SKPD Kabupaten Pekalongan.

b. Koordinator

Koordinator diartikan sebagai *stakeholder* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat. Salah satu sarana dalam menyelaraskan gerak antar-*stakeholder* adalah melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan hasil penelitian, rapat koordinasi diadakan dua kali dalam satu tahun dimana dilaksanakan pada awal dan akhir tahun guna membahas perencanaan program dan anggaran di awal tahun dan pembahasan evaluasi terkait kinerja di setiap akhir tahun. Intensitas koordinasi semacam ini dirasa masih belum efektif karena pengembangan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Pekalongan melibatkan banyak *stakeholder* dengan tugas, fungsi karakteristik yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan kegiatan koordinasi yang lebih intensif lagi untuk menyelaraskan kegiatan dalam pelaksanaan pengembangan.

c. Fasilitator

Fasilitator adalah *stakeholder* yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran. Dalam konteks pengembangan kawasan lingkup Pemerintahan Kabupaten Pekalongan, fasilitator diwakili oleh tim koordinasi. Tim ini memiliki peran penting dalam pelaksanaan program, menjembatani kebijakan yang tercantum dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RPIJM Minapolitan, dan Renja SKPD menjadi program yang aplikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat serta instansi terkait di Kabupaten Pekalongan. Namun, hasil kajian di lapangan menunjukkan bahwa peran tim koordinasi dan kelompok kerja belum dilaksanakan secara maksimal. Beberapa indikator menunjukkan kurangnya kegiatan dan dukungan dana dari berbagai *stakeholder*, seperti Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata, BP4K, dan Badan Lingkungan Hidup.

d. Implementer

Implementer merupakan *stakeholder* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.

e. Akselerator

Stakeholder berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

3.4 Reformasi birokrasi

Dua strategi umum yang sering digunakan dalam reformasi administrasi negara di negara-negara berkembang yang mengalami transformasi menuju negara maju adalah sebagai berikut.

Penyederhanaan birokrasi; birokrasi yang rumit dan tidak efisien sering menjadi hambatan dalam pembangunan. Oleh karena itu, strategi ini fokus pada penyederhanaan struktur birokrasi, pengurangan lapisan administratif yang tidak perlu, dan pemangkasan regulasi yang berlebihan. Tujuannya adalah untuk menciptakan birokrasi yang lebih responsif, efisien, dan mudah diakses bagi masyarakat dan bisnis.

Peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas; transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar penting dalam reformasi administrasi negara. Langkah-langkah dalam strategi ini meliputi pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif, peningkatan aksesibilitas informasi publik, pemberdayaan lembaga audit, dan penegakan hukum terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif untuk pembangunan.

Reformasi administrasi memang menjadi kunci penting dalam pembangunan suatu negara. Melalui pengalaman Korea Selatan, kita dapat melihat bagaimana upaya keras dalam merevitalisasi administrasi negara dapat menghasilkan efisiensi dan profesionalisme yang tinggi. Deregulasi, simplifikasi prosedur, dan restrukturisasi pemerintah merupakan langkah-langkah yang penting dalam mencapai tujuan tersebut. Tentu, tidak bisa diabaikan bahwa reformasi administrasi juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Peran komisi reformasi administrasi, seperti yang diperkuat pada masa pemerintahan Rho Tae Woo, menjadi sangat penting dalam memfasilitasi proses reformasi tersebut. Selain itu, adanya regulasi terkait etika dan kontrol dalam pelayanan publik juga merupakan langkah yang tidak bisa dianggap remeh.

Isu-isu dan agenda yang disebutkan merupakan hal-hal yang tengah berkembang dalam kaitan dengan reformasi birokrasi. Dalam menjalankan reformasi birokrasi, penting untuk memperhatikan hal-hal tersebut agar dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan.

Isu reformasi birokrasi memang menjadi perbincangan yang relevan di Indonesia, terutama dalam mengatasi berbagai krisis multidimensi yang belum terselesaikan. Sistem birokrasi yang menjadi tulang punggung pelayanan publik di Indonesia menghadapi tantangan yang mendasar. Salah satunya adalah akar sejarahnya yang berasal dari masa kolonial, di mana struktur, norma, nilai, dan regulasi yang ada masih mencerminkan kepentingan penguasa kolonial daripada kepentingan hak-hak sipil warga negara. Dalam konteks ini, tidak mengherankan jika struktur dan proses administrasi yang terbangun lebih cenderung sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku masyarakat, bukan sebagai alat untuk melayani masyarakat. Misi utama administrasi negara pada masa kolonial adalah untuk mempertahankan kekuasaan dan mengontrol perilaku individu. Namun, melalui reformasi birokrasi, upaya dilakukan untuk mengubah paradigma ini. Reformasi birokrasi bertujuan untuk membuat birokrasi lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta lebih efisien dan transparan dalam memberikan

pelayanan. Langkah-langkah seperti penyederhanaan regulasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas SDM birokrasi, dan penerapan teknologi informasi adalah beberapa strategi yang diambil untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Ketidaksiapan politik dan kekurangan visi yang jelas memang dapat menghambat reformasi birokrasi. Tanpa komitmen yang kuat dari pemerintah serta paradigma yang jelas tentang peran administrasi negara dalam pembangunan, upaya-upaya reformasi cenderung menjadi sporadis dan kurang terarah. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan program pembangunan dan menghambat peningkatan kapasitas administrasi negara sebagai agen pembangunan. Pentingnya memiliki visi yang terintegrasi dan tujuan yang jelas dalam reformasi birokrasi tidak dapat dilebih-lebihkan.

Reformasi dan modernisasi birokrasi memang memerlukan pendekatan yang komprehensif, seperti yang telah Anda jelaskan. Aspek eksternal yang fokus pada hubungan antara birokrasi dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan juga memastikan akuntabilitas pelayanan publik. Kontrak baru antara birokrasi dan masyarakat dapat menciptakan kerangka kerja yang jelas tentang apa yang diharapkan dari kedua belah pihak dan bagaimana mereka akan saling mendukung. Di sisi lain, aspek internal juga krusial untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja birokrasi. Debirokratisasi struktur internal membantu mengurangi birokrasi yang berlebihan dan memfasilitasi aliran kerja yang lebih lancar dan responsif. Modernisasi proses internal, seperti menggunakan teknologi informasi untuk otomatisasi tugas rutin, juga sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan manusia. Selain itu, peningkatan kemampuan aparat birokrasi melalui pelatihan dan pengembangan dapat membantu memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan zaman. Dengan memperhatikan semua aspek ini, reformasi dan modernisasi birokrasi di Indonesia dapat menghasilkan sistem yang lebih responsif, efisien, dan akuntabel, yang pada gilirannya akan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Pentingnya reformasi birokrasi yang menyeluruh, termasuk aspek politik, hukum, budaya, dan mentalitas. Reformasi yang efektif memang membutuhkan lebih dari sekadar perubahan struktural. Profesionalitas dan netralitas birokrasi adalah inti dari upaya reformasi tersebut. Pentingnya batasan yang jelas antara pejabat karir dan pejabat politik untuk memastikan independensi dan efisiensi birokrasi. Langkah-langkah seperti memastikan pejabat politik dipilih melalui proses yang transparan dan akuntabel, serta memperkuat peran lembaga yang dipilih oleh rakyat, merupakan langkah-langkah penting dalam memastikan integritas birokrasi. Komitmen dari semua pihak, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sangat diperlukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berhasil. Tanpa dukungan dan kesatuan visi dari berbagai cabang pemerintahan, upaya reformasi tersebut bisa terhambat. Seiring dengan itu, kepemimpinan nasional yang kuat dan progresif juga merupakan kunci dalam memimpin perubahan menuju birokrasi yang lebih baik.

4. Kesimpulan

Proses reformasi birokrasi di Kabupaten Pekalongan memang memerlukan partisipasi aktif dari berbagai stakeholder untuk mencapai peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas pemerintahan. Partisipasi *stakeholder* membantu memastikan bahwa proses reformasi dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, partisipasi *stakeholder* dalam proses reformasi birokrasi di Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas pemerintahan. Inovasi manajemen menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan potensi yang ada demi perbaikan dan pemecahan masalah di Kabupaten Pekalongan.

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Pekalongan, terdapat beberapa faktor penyebab penyakit atau permasalahan yang mempengaruhi peran partisipasi *stakeholder*. Dengan memahami faktor-faktor ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi *stakeholder* dan mengatasi permasalahan yang ada. Strategi ini harus mencakup reformasi budaya organisasi, pengembangan kapasitas kepemimpinan, penataan ulang tugas dan fungsi OPD, perbaikan kondisi keuangan, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.

Kontribusi Penulis

Penulis berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menggunakan pendanaan eksternal.

Pernyataan Dewan Peninjau Etis

Tidak berlaku.

Pernyataan *Informed Consent*

Tidak berlaku.

Pernyataan Ketersediaan Data

Tidak berlaku.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Akses Terbuka

©2024. Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media atau format apa pun, selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berikan tautan ke lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika ada perubahan. Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel tersebut, kecuali dinyatakan lain dalam batas kredit materi tersebut. Jika materi tidak termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel dan tujuan penggunaan Anda tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan, Anda harus mendapatkan izin langsung dari pemegang hak cipta. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Daftar Pustaka

Ndraha, T. (1990). *Pengembangan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Rineka Cipta.

Biografi Penulis

ROBBY DARUSSALAM, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945.

- Email: robbyesco2@gmail.com
- ORCID: -
- Web of Science ResearcherID: -
- Scopus Author ID: -
- Homepage: -